

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **V.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian atas data dalam penelitian, tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh karakteristik pemerintahan, kompleksitas pemerintahan, dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Karakteristik pemerintahan yang diukur dengan pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif karena, Pendapatan Asli Daerah yang signifikan membuat peningkatan pada rasa kepedulian masyarakat mengenai pajak dan retribusi yang menjadi hal kewajiban yang harus dibayarkan, masyarakat lebih cenderung hanya menjalankan suatu kewajiban tanpa menuntut terhadap haknya. Sehingga dapat berdampak kepada pengungkapan pendapatan asli daerah menjadi hal yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah.
- b. Kompleksitas pemerintahan yang diukur dengan Jumlah SKPD berpengaruh tidak signifikan karena, hal ini disebabkan jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) banyak memberikan kegiatan di dalam lingkup antar SKPD sehingga dapat meningkatkan pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih banyak. Kemudian karena dengan meningkatnya jumlah SKPD maka kompleksitas semakin meningkat dan menyebabkan peningkatan terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah (pengungkapan menjadi lebih baik).
- c. Temuan audit diukur dengan jumlah temuan audit berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. Penjelasan mengenai mengapa tidak terdapat keterkaitan antara temuan audit terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah disebabkan karena belum berjalannya proses asimetri informasi yang seharusnya, jumlah temuan

audit BPK tidak mendorong pemerintah daerah dalam meningkatkan pengungkapannya.

## V.2 Saran

Saran untuk penelitian ini bagi pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Rata-rata tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah untuk seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Jawa masih rendah sekali, sebab masih banyak Kabupaten/Kota yang tidak mengungkapkan sesuai dengan item berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dan bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menguji variabel lain diluar dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini seperti tingkat ketergantungan pemerintah daerah, ukuran legislatif, opini audit dan lain sebagainya. Sehingga, lebih menguatkan penelitian yang diduga dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah.

